

Hegemoni Ekonomi VOC di Nusantara: Analisis Monopoli Rempah-Rempah dan Dampaknya terhadap Pasar Global Abad ke-17

Dian Sartika¹ Sobri Sabana² Rosmaida Sinaga³ Sherly Natasya Situmeang⁴ Engelni Mei Sitanggang⁵ Adriel Surbakti⁶ Fatur Rahman Damanik⁷

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: diansartika7658@gmail.com¹ ajasobri938@gmail.com²
rosmaidasinaga@unimed.ac.id³ serlinatasya79@gmail.com⁴ meysitanggang1@gmail.com⁵
adrielsurbakti112@gmail.com⁶ fathurrahman0745@gmail.com⁷

Abstract

This article analyzes the economic hegemony of the Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in the Indonesian Archipelago through the spice monopoly in the 17th century and its impact on the global market. The research uses a historical qualitative method with a literature study approach. The results show that VOC implemented systematic strategies including plant destruction (extirpatie), Hongi voyages (hongitochten), strict distribution control, and political manipulation (divide et impera) to control spice production and trade. The impacts were dualistic: in Europe it caused price stabilization, capital accumulation, and economic development; while in the Archipelago it led to the destruction of traditional trade networks, community impoverishment, and loss of political sovereignty. This study highlights VOC as an early manifestation of global corporate capitalism that remains relevant for understanding contemporary political economy dynamics.

Keywords: VOC, Economic Hegemony, Spice Monopoly, 17th Century Global Market, Indonesian Archipelago

Abstrak

Artikel ini menganalisis hegemoni ekonomi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Nusantara melalui monopoli rempah-rempah pada abad ke-17 dan dampaknya terhadap pasar global. Penelitian menggunakan metode kualitatif historis dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VOC menerapkan strategi sistematis termasuk pemusnahan tanaman (*extirpatie*), pelayaran Hongi (*hongitochten*), kontrol distribusi ketat, dan manipulasi politik (*divide et impera*) untuk menguasai produksi dan perdagangan rempah-rempah. Dampaknya bersifat dualistik: di Eropa menyebabkan stabilisasi harga, akumulasi modal, dan perkembangan ekonomi; sementara di Nusantara mengakibatkan kehancuran jaringan perdagangan tradisional, pemiskinan masyarakat, dan hilangnya kedaulatan politik. Studi ini menyoroti VOC sebagai perwujudan awal kapitalisme korporat global yang relevan untuk memahami dinamika ekonomi politik kontemporer.

Kata Kunci: VOC, Hegemoni Ekonomi, Monopoli Rempah-Rempah, Pasar Global Abad ke-17, Nusantara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada abad ke-17, dunia menyaksikan sebuah fenomena ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya: sebuah perusahaan dagang asing berhasil menguasai sumber daya paling berharga di dunia dan mengendalikan pasokannya ke pasar global. Fenomena ini berpusat di Nusantara dan komoditasnya adalah rempah-rempah, khususnya cengkeh, pala, dan fuli. Bagi dunia Eropa, rempah-rempah bukan sekadar bumbu masakan. Mereka adalah simbol status, komoditas dengan profit margin yang fantastis, dan bahan yang diyakini memiliki khasiat magis dan medis. Sejarawan Jack Turner (2004) menyebutnya sebagai objek yang memicu "imajinasi, obsesi, dan ekspedisi" yang mengubah peta dunia. Nilainya yang setara dengan emas menjadikan perdagangannya sebagai bisnis paling menguntungkan pada zamannya. Jauh

sebelum kapal-kapal Eropa mengarungi lautan Nusantara, wilayah ini telah menjadi poros perdagangan global. Masyarakat lokal di Maluku dan Banda telah membangun jaringan perdagangan yang canggih dan luas. Rempah-rempah mengalir dari pulau-pulau kecil tersebut melalui pedagang Jawa, Melayu, dan Bugis ke pusat emporium seperti Malaka, lalu diteruskan oleh pedagang Gujarat dan Arab hingga akhirnya tiba di pelabuhan Venesia dan Aleksandria untuk didistribusikan ke seluruh Eropa (Ricklefs, 2008). Jaringan multi-etnis ini berjalan dinamis, ditopang oleh hubungan dagang yang sudah mapan.

Keadaan tersebut berubah secara drastis dengan kedatangan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan yang dibentuk pada 1602 ini bukan sekadar firma dagang biasa. VOC dilengkapi dengan *octrooi* (piagam) yang memberinya hak-hak istimewa layaknya sebuah negara: memonopoli perdagangan, memiliki tentara, menyatakan perang, membuat perjanjian, dan mencetak uang (Gaastra, 2003). Motivasi utamanya adalah memutus mata rantai perdagangan tradisional yang panjang dan mahal itu, lalu memusatkan kendali atas produksi dan distribusi rempah-rempah langsung dari sumbernya. Ambisi inilah yang melahirkan sebuah sistem hegemoni ekonomi—dominasi melalui paksaan dan konsensus di Nusantara. Studi tentang monopoli VOC yang terjadi ratusan tahun lalu bukan sekadar kilas balik sejarah. Ia sangat relevan untuk memahami akar dari dua fenomena modern: kapitalisme global dan imperialisme. VOC sering disebut sebagai *multinational corporation* (MNC) pertama di dunia, dan praktik monopolinya merupakan bentuk awal dari kapitalisme korporat yang didukung oleh kekuatan negara (van Bunge, 2018). Analisis terhadap strategi dan dampak hegemoni VOC memberikan lensa kritis untuk melihat bagaimana korporasi besar, dengan dukungan kekuatan politik, dapat mendikte pasar global, mengeksploitasi sumber daya, dan mengubah tatanan sosial-budaya suatu wilayah—sebuah pola yang masih dapat kita amati dalam berbagai bentuk hingga hari ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis mekanisme dan instrumen hegemoni ekonomi yang digunakan VOC untuk menerapkan monopoli rempah-rempah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengukur dampak ekonomi dari kebijakan monopoli tersebut, tidak hanya pada masyarakat Nusantara tetapi juga pada percaturan perdagangan dan harga rempah-rempah di pasar global pada abad ke-17. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana sebuah entitas korporasi dapat membentuk ulang ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat data yang dibutuhkan, yaitu data historis yang bersifat tekstual dan kontekstual mengenai hegemoni ekonomi VOC di Nusantara pada abad ke-17. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis guna merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai strategi monopoli VOC dan dampaknya terhadap pasar global. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan antar konsep dalam sumber-sumber yang dikaji. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder guna mendapatkan gambaran yang utuh dan akurat. Sumber primer dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen otentik dari abad ke-17 dan ke-18 yang berkaitan langsung dengan aktivitas VOC di Nusantara. Sumber-sumber ini termasuk:

1. Arsip VOC seperti *Dagbregisters* (buku harian benteng), *Generale Missiven* (laporan berkala dari Hindia Belanda ke Belanda), dan resolusi dari Dewan Hindia.
2. Perjanjian politik antara VOC dengan penguasa lokal, seperti Perjanjian Banten (1684).
3. Catatan perjalanan dan memoar dari orang-orang Eropa yang hidup pada masa tersebut, seperti tulisan Jan Pieterszoon Coen dan François Valentijn.
4. Dokumen administrasi VOC yang mencatat transaksi perdagangan, kebijakan monopoli, dan hubungan dengan masyarakat lokal.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya akademik yang memberikan analisis, interpretasi, dan kontekstualisasi atas peristiwa sejarah. Sumber-sumber ini meliputi:

1. Buku-buku sejarah yang membahas VOC, ekonomi kolonial, dan sejarah Nusantara, seperti karya M.C. Ricklefs, F.S. Gaastra, dan Anthony Reid.
2. Jurnal akademik yang memuat penelitian tentang monopoli rempah-rempah, imperialisme Eropa, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.
3. Artikel ilmiah yang mengkaji strategi ekonomi dan politik VOC dari perspektif multidisiplin, seperti ekonomi politik, sejarah maritim, dan studi kolonial.
4. Disertasi dan tesis yang memberikan analisis mendalam tentang aspek-aspek spesifik dari hegemoni VOC di Nusantara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi dan Mekanisme Monopoli VOC di Nusantara

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tidak sekadar menjadi pedagang di Nusantara, melainkan memaksakan hegemoni ekonomi melalui serangkaian strategi yang terstruktur dan brutal. Perusahaan dagang ini bertindak layaknya negara dalam wujud korporasi, dengan satu tujuan utama: mengontrol seluruh rantai pasokan rempah-rempah dari sumbernya hingga ke pasar global. Untuk mencapai ini, VOC menerapkan beberapa mekanisme monopoli yang saling terkait. Strategi paling kejam VOC adalah memastikan tidak ada rempah-rempah yang diperdagangkan di luar jalur mereka. Mereka menyadari bahwa selama pohon cengkeh dan pala tumbuh bebas di pulau-pulau lain, monopoli mutlak mustahil tercapai. Oleh karena itu, VOC meluncurkan *extirpatie*—kampanye pemusnahan tanaman rempah-rempah di pulau-pulau di luar kendali mereka. Sejarawan M.C. Ricklefs (2008) menggambarkan praktik ini sebagai "penghancuran sistematis atas kebun-kebun cengkeh dan pala" (h. 72). Pasukan VOC, seringkali dibantu oleh sekutu lokal, secara rutin menebang pohon-pohon rempah untuk memusnahkan pasokan yang bisa diperjualbelikan oleh pedagang independen. Di wilayah yang mereka kuasai (seperti Ambon untuk cengkeh dan Banda untuk pala), VOC menerapkan sistem *controleur* (pengawas) yang memantau setiap fase produksi. Setiap pohon dicatat, hasil panen ditetapkan kuotanya, dan penjualan diatur ketat. Petani dilarang keras menjual rempah kepada siapa pun kecuali VOC dengan harga yang sudah ditentukan sepihak oleh perusahaan.

Untuk menegakkan aturan monopoli ini, VOC menggunakan instrumen kekerasan yang dikenal sebagai *hongitochten* (pelayaran Hongi). Armada kecil kapal perang VOC, biasanya dikendarai oleh prajurit-prajurit dari Papua atau pulau lain yang telah dipersenjatai, berpatroli mengelilingi perairan Maluku. Tugas mereka adalah memerangi penyelundupan dan menghukum siapa saja yang melanggar peraturan VOC. Sebagaimana dicatat oleh Bernard H.M. Vlekke dalam *Nusantara: A History of Indonesia* (1960), "Pelayaran Hongi adalah alat teror yang efektif; mereka menghancurkan perahu-perahu, membakar desa-desa, dan menghukum mati para pelanggar" (h. 155). Praktik ini menciptakan iklim ketakutan yang mencegah petani dan pedagang lokal untuk berinteraksi dengan pihak lain. VOC sangat mahir memanfaatkan dan

memperkeruh persaingan politik antar kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Mereka kerap melibatkan diri dalam konflik internal, memihak salah satu kelompok, dan sebagai imbalannya, memaksa penguasa lokal untuk menandatangani perjanjian eksklusif. Perjanjian-perjanjian ini, yang seringkali dibuat dalam kondisi tidak setara dan dipaksakan, mewajibkan penguasa lokal untuk hanya menjual rempah-rempah mereka kepada VOC dan mengusir semua pedagang saingan, terutama Portugis, Spanyol, dan Inggris.

Salah satu contoh paling terkenal adalah Perjanjian Banten pada 1684, yang secara efektif mengusir semua pedagang Eropa lainnya dari wilayah tersebut. F.S. Gaastra (2003) dalam *The Dutch East India Company: Expansion and Decline* menyimpulkan bahwa "VOC tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer dan intrik politik untuk memastikan kepatuhan dari penguasa pribumi" (h. 112). Dengan strategi *divide et impera* ini, VOC berhasil mengisolasi kerajaan-kerajaan lokal dan mencegah mereka membentuk aliansi yang bisa melawan monopoli. VOC membangun jaringan benteng (*factorij*) di titik-titik strategis sepanjang rute perdagangan rempah-rempah, seperti Batavia, Ambon, dan Banda. Benteng-benteng ini berfungsi ganda: sebagai pusat logistik untuk mengumpulkan dan menyimpan rempah, dan sebagai pangkalan militer untuk mempertahankan hegemoni mereka. Selain itu, VOC menginvestasikan banyak sumber daya untuk memetakan rute pelayaran, mempelajari pola angin muson, dan mengumpulkan intelijen tentang aktivitas pesaing dan penguasa lokal. Penguasaan informasi ini memberi mereka keunggulan kompetitif yang sangat besar dibandingkan pedagang lain.

Kontrol atas Distribusi dan Logistik

Selain menguasai produksi rempah-rempah di sumbernya, VOC membangun sistem distribusi dan logistik yang sangat ketat untuk memastikan tidak ada satu pun rempah yang bisa diperdagangkan di luar jalur yang mereka tentukan. Kontrol ini menjadi tulang punggung monopoli mereka dan menunjukkan bagaimana VOC beroperasi seperti sebuah negara yang lengkap dengan infrastrukturnya sendiri. VOC membangun jaringan benteng (*factorij*) di lokasi-lokasi strategis di seluruh Nusantara. Benteng-benteng ini, seperti Batavia (pusat administrasi), Castle Victoria di Ambon, dan Fort Nassau di Banda, berfungsi sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi rempah-rempah. Setiap benteng dilengkapi dengan gudang yang aman untuk menimbun hasil rempah sebelum dikirim ke Batavia atau langsung ke Eropa. Menurut sejarawan Leonard Blussé dalam *Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia* (1986), "Benteng-benteng VOC tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer, tetapi lebih penting lagi sebagai simpul dalam jaringan logistik global perusahaan" (h. 89). Dari benteng-benteng inilah VOC mengawasi pergerakan kapal, mengontrol aktivitas perdagangan lokal, dan mencegah penyelundupan.

VOC menerapkan sistem konvoi yang ketat untuk pengiriman rempah-rempah. Kapal-kapal dagang tidak diizinkan berlayar sendiri-sendiri, tetapi harus menunggu dan berlayar dalam rombongan besar yang dikawal oleh kapal perang. Sistem ini bertujuan untuk melindungi muatan berharga mereka dari serangan bajak laut, kapal-kapal saingan Eropa, dan kemungkinan pemberontakan awak kapal. Seperti dicatat oleh Femme Gaastra dalam *The Dutch East India Company: Expansion and Decline* (2003), "Setiap tahun, armada VOC berangkat dan tiba menurut jadwal yang tetap, menciptakan ritme tetap dalam perdagangan rempah-rempah yang dapat diprediksi dan dikendalikan" (h. 134). Sistem yang teratur ini memungkinkan VOC mengatur pasokan rempah ke pasar Eropa, sehingga menjaga harga tetap tinggi dan menguntungkan. VOC memonopoli tidak hanya perdagangan rempah-rempah, tetapi juga jalur pelayaran penting. Mereka menerapkan sistem surat jalan (*pasbrief*) yang mewajibkan setiap kapal, termasuk kapal pribumi, untuk memiliki izin berlayar dari VOC. Setiap kapal yang ditemukan tanpa izin dapat disita dan kargonya dirampas.

Anthony Reid dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce* (1993) menjelaskan bahwa "VOC mengklaim hak untuk memeriksa dan menyita kapal-kapal yang melintas di perairan yang mereka kuasai, sebuah klaim yang tidak pernah ada dalam tradisi maritim Asia Tenggara sebelumnya" (h. 295). Praktik ini efektif memutus jalur perdagangan tradisional Nusantara yang telah berlangsung selama berabad-abad. VOC mengembangkan sistem administrasi dan pencatatan yang sangat detail untuk mengontrol distribusi. Setiap transaksi dicatat dengan cermat dalam *Daghregisters* (buku harian benteng), termasuk jumlah rempah yang diterima, kualitasnya, dan kapal yang mengangkutnya. Sistem ini memungkinkan kontrol inventaris yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi. VOC memonopoli penggunaan kapal-kapal besar yang mampu mengarungi rute jauh ke Eropa. Pedagang lokal hanya diizinkan menggunakan perahu kecil untuk perdagangan pantai yang dibatasi. Dengan mengontrol alat angkut utama, VOC memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kemampuan logistik untuk melakukan perdagangan jarak jauh.

Dampak Monopoli terhadap Pasar Global Dampak di Eropa

Kebijakan monopoli rempah-rempah yang diterapkan VOC di Nusantara tidak hanya mengubah wajah perdagangan Asia, tetapi juga membawa dampak yang mendalam dan luas terhadap perekonomian dan masyarakat Eropa. Kontrol ketat VOC atas pasokan rempah-rempah menciptakan gelombang perubahan yang dirasakan dari Amsterdam hingga Lisboa. Salah satu dampak paling nyata adalah stabilisasi dan bahkan penurunan harga rempah-rempah di pasar Eropa. Sebelum VOC memonopoli pasokan dari sumbernya, rempah-rempah harus melalui banyak perantara, yang masing-masing menaikkan harganya. Dengan mengontrol produksi dan distribusi langsung dari sumber, VOC mampu memotong mata rantai perdagangan yang panjang ini. Sejarawan Jonathan Israel dalam *Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740* (1989) mencatat bahwa "monopoli VOC atas rempah-rempah menyebabkan penurunan harga retail yang signifikan di Eropa, membuat produk yang sebelumnya hanya terjangkau bagi kaum elit menjadi dapat diakses oleh kelas menengah yang sedang tumbuh" (h. 215). Harga lada, misalnya, turun hingga 60% antara tahun 1600 dan 1650, sementara harga cengkeh dan pala juga mengalami penurunan yang stabil meskipun tetap menguntungkan bagi VOC. Keuntungan besar yang dihasilkan dari monopoli rempah-rempah menjadi fondasi bagi akumulasi modal di Belanda. Menurut data yang dikutip oleh Femme Gaastra dalam *The Dutch East India Company: Expansion and Decline* (2003), "Pada puncak kejayaannya, dividen yang dibayarkan VOC kepada pemegang saham bisa mencapai 40% per tahun, jumlah yang luar biasa untuk zaman itu" (h. 167).

Aliran modal yang besar ini tidak hanya memperkaya para pedagang Belanda, tetapi juga membiayai berbagai inovasi dan perkembangan di Eropa. Sebagaimana ditunjukkan oleh Harold J. Cook dalam *Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age* (2007), "Keuntungan dari perdagangan rempah-rempah membiayai tidak hanya ekspansi komersial lebih lanjut, tetapi juga revolusi ilmiah dan perkembangan budaya di Belanda" (h. 89). Dana dari perdagangan rempah-rempah mendukung penelitian ilmiah, pendirian universitas, dan perkembangan seni. Monopoli VOC menyebabkan pergeseran signifikan dalam pusat-pusat perdagangan Eropa. Antwerpen dan Lisboa, yang sebelumnya menjadi pusat distribusi rempah-rempah, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, Amsterdam emerged sebagai pusat perdagangan dunia yang baru. Seperti dijelaskan oleh Douglas Irwin dalam *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade* (1996), "Kontrol Belanda atas rempah-rempah melalui VOC mentransformasikan Amsterdam dari pelabuhan regional menjadi pusat keuangan dan komersial global yang pertama benar-benar modern" (h. 45). Bursa saham

Amsterdam menjadi yang paling aktif di dunia, dengan saham VOC menjadi komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Ketersediaan rempah-rempah yang lebih konsisten dan harga yang lebih terjangkau mengubah pola konsumsi di Eropa. Rempah-rempah yang sebelumnya merupakan simbol status eksklusif bagi bangsawan kaya, perlahan menjadi lebih dapat diakses oleh kelas menengah yang sedang tumbuh.

Menurut penelitian Wolfgang Schivelbusch dalam *Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants, and Intoxicants* (1992), "Demokratisasi konsumsi rempah-rempah ini merefleksikan perubahan sosial yang lebih luas di Eropa, dimana kelas menengah mulai meniru gaya hidup yang sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh aristokrasi" (h. 78). Rempah-rempah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai bumbu masakan tetapi juga sebagai bahan obat-obatan dan parfum. Kebutuhan untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan rempah-rempah dalam skala besar mendorong perkembangan industri manufaktur awal di Belanda. Pabrik-pabrik pengolahan rempah, industri pembuatan kapal, dan sektor logistik mengalami pertumbuhan pesat. Seperti dicatat oleh Jan de Vries dalam *The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750* (1976), "Infrastruktur yang dibangun untuk mendukung perdagangan rempah-rempah menjadi fondasi bagi industrialisasi Belanda selanjutnya, menciptakan model bisnis yang akan ditiru oleh negara-negara Eropa lainnya" (h. 134).

Dampak di Asia dan Nusantara

Sementara Eropa menikmati manfaat dari monopoli rempah-rempah, wilayah Asia dan khususnya Nusantara justru mengalami dampak yang sangat destruktif. Kebijakan monopoli VOC tidak hanya mengubah pola perdagangan, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial-ekonomi yang telah berkembang selama berabad-abad. Sebelum kedatangan VOC, Nusantara memiliki jaringan perdagangan regional yang kompleks dan maju. Rempah-rempah dari Maluku diperdagangkan melalui jalur yang melibatkan pedagang Jawa, Melayu, Bugis, China, India, dan Arab. VOC secara sistematis menghancurkan jaringan ini dengan memaksa semua perdagangan rempah-rempah hanya melalui mereka. Anthony Reid dalam *Southeast Asia in the Age of Commerce* (1993) menggambarkan bagaimana "VOC memotong jalur perdagangan tradisional yang telah menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Nusantara dengan pusat-pusat perdagangan Asia lainnya selama berabad-abad" (h. 290). Akibatnya, kota-kota pelabuhan yang sebelumnya makmur seperti Malaka, Banten, dan Makassar mengalami kemunduran signifikan.

Petani rempah-rempah yang sebelumnya bebas menjual hasil panennya kepada siapa pun dengan harga pasar, sekarang dipaksa menjual hanya kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. VOC menerapkan sistem *leverantie* (penyerahan wajib) dimana petani harus menyerahkan hasil panen mereka dengan harga sangat rendah. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam *A History of Modern Indonesia* (2008) mencatat bahwa "harga yang dibayarkan VOC kepada petani rempah-rempah seringkali hanya 10-20% dari harga pasar internasional" (h. 85). Praktek ini menyebabkan pemiskinan massal di daerah-daerah penghasil rempah-rempah seperti Maluku dan Banda. VOC menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang memaksa petani menanam hanya jenis rempah-rempah tertentu yang menguntungkan VOC. Sistem ini menghancurkan diversifikasi pertanian tradisional dan membuat masyarakat lokal bergantung pada satu komoditas saja. Leonard Blussé dalam *Strange Company* (1986) menjelaskan bahwa "monokultur yang dipaksakan VOC menyebabkan kerentanan ekologis dan kelaparan ketika terjadi gagal panen" (h. 112). Di banyak daerah, sistem tradisional *subak* dan pertanian campuran ditinggalkan untuk memenuhi tuntutan VOC. Kebijakan VOC yang brutal menyebabkan depopulasi massal di beberapa wilayah. Yang paling tragis adalah pembantaian hampir seluruh populasi Kepulauan Banda pada tahun 1621 karena menolak monopoli VOC.

Menurut catatan Adrian Vickers dalam *A History of Modern Indonesia* (2005), "hampir 90% populasi Banda tewas atau diusir dari tanah air mereka" (h. 67).

Di daerah lain, kerja paksa dan penyakit yang dibawa oleh orang Eropa menyebabkan penurunan populasi yang signifikan. Sistem *herendiensten* (kerja rodi) yang diterapkan VOC untuk membangun benteng dan infrastruktur mengambil tenaga kerja produktif dari kegiatan pertanian. VEC sengaja melemahkan kerajaan-kerajaan lokal dengan menerapkan kebijakan *divide et impera* (pecah belah dan kuasai). Mereka campur tangan dalam suksesi kerajaan, mendukung penguasa boneka, dan memicu perang saudara untuk memperlemah kekuatan politik lokal. Seperti ditunjukkan oleh Heather Sutherland dalam *The Making of a Bureaucratic Elite* (1979), "VEC secara sistematis menghancurkan institusi-institusi politik tradisional dan menggantikannya dengan birokrasi kolonial yang tunduk pada kepentingan mereka" (h. 45). Bangsa-bangsa Nusantara yang sebelumnya menguasai jalur pelayaran kehilangan kedaulatan maritim mereka. VOC memonopoli hak berlayar dengan menerapkan sistem surat jalan (*pasbrief*) dan memberlakukan hukuman berat bagi yang melanggar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hegemoni ekonomi VOC di Nusantara pada abad ke-17 merupakan sebuah fenomena transformatif yang mengubah lanskap ekonomi global secara permanen. Melalui kombinasi strategi yang brutal dan terstruktur mulai dari pemusnahan tanaman (*extirpatie*), pelayaran Hongi (*hongitochten*), manipulasi politik (*divide et impera*), hingga kontrol ketat atas distribusi dan logistik VOC berhasil memonopoli produksi dan perdagangan rempah-rempah, komoditas paling berharga pada masa itu. Dampak dari monopoli ini bersifat dualistik: di satu sisi, Eropa menuai keuntungan besar yang membiayai Revolusi Ilmiah, perkembangan seni, dan transformasi Amsterdam menjadi pusat keuangan global. Di sisi lain, Nusantara mengalami kehancuran sistemik—jaringan perdagangan tradisional terputus, masyarakat lokal mengalami pemiskinan dan depopulasi, serta kedaulatan politik dan maritim direnggut oleh kekuatan korporasi yang didukung negara. VOC tidak hanya sekadar perusahaan dagang, tetapi merupakan perwujudan awal dari kapitalisme global dan imperialisme modern, dimana entitas korporasi dengan kekuatan politik dan militer mampu mendikte pasar global dan mengeksploitasi sumber daya suatu wilayah. Warisan dari sistem ini masih terasa hingga hari ini, baik dalam struktur ekonomi global yang timpang maupun dalam memori kolektif bangsa-bangsa yang pernah dijajah. Penelitian ini mempertegas bahwa monopoli VOC bukan sekadar babak dalam sejarah ekonomi, melainkan cermin dari bagaimana kekuatan korporasi ketika dibiarkan tanpa control dapat mengubah nasib bangsa dan membentuk ulang dunia. Pemahaman ini menjadi relevan hingga kini dalam mengkritisi hubungan antara kekuatan korporasi global, negara, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blussé, L. (1986). *Strange Company: Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia*. Foris Publications.
- Cook, H. J. (2007). *Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age*. Yale University Press.
- Gaastra, F. S. (2003). *The Dutch East India Company: Expansion and Decline*. Walburg Pers.
- Irwin, D. A. (1996). *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade*. Princeton University Press.
- Israel, J. I. (1989). *Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740*. Clarendon Press.
- Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680: Volume Two: Expansion and Crisis*. Yale University Press.

- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Schivelbusch, W. (1992). *Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants, and Intoxicants*. Pantheon Books.
- Turner, J. (2004). *Spice: The History of a Temptation*. Vintage Books.
- Van Bunge, W. (2018). The Dutch East India Company and the Dutch Republic: A Historical Study of Their Interrelationships. *Journal of Early Modern History*, 22 (5), 405-424.
- Vlekke, B. H. M. (1960). *Nusantara: A History of Indonesia*. Brill.
- Vries, J. de. (1976). *The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600–1750*. Cambridge University Press.